



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 25 Maret 2017

Halaman: 2

Pansus Klarifikasi Wajib Pajak

YOGYA (MERAPI) - Penelusuran hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pendapatan daerah Kota Yogyakarta tahun 2016 dilakukan sampai ke wajib pajak terkait. Panitia Khusus yang bertugas menelusuri temuan BPK itu akan mengundang wajib pajak tersebut untuk diminta klarifikasi.

"Pekan depan rapat pansus akan mengundang beberapa wajib pajak terkait hasil pemeriksaan BPK terhadap pendapatan daerah," kata Ketua Pansus Hasil Pemeriksaan BPK, Nasrul Khoiri, Jumat (24/3).

Klarifikasi ke wajib pajak terkait dinilai penting. Pasalnya salah satunya temuan BPK ter-

kait pajak reklame dari penyelenggara reklame tak berizin maupun habis masa izinnya yang tidak terealisasi mencapai Rp 953 juta. Ada 13 titik reklame yang pembayaran pajaknya tidak terealisasi. Temuan BPK lainnya terkait pengelolaan pajak hotel, restoran, retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan sampah.

Menurutnya jika Pemkot Yogyakarta tidak ada upaya penagihan maupun penghapusan piutang pajak reklame yang tidak terealisasi atau tidak terbayar dapat menjadi potensi kerugian negara. "Perspektif saya kalau pemkot tidak ada upaya pengelolaan maupun tidak tertagih, itu bisa masuk potensi kerugian negara," imbuhnya.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005